

Kontradiksi Demokrasi Liberal dan “Akhir Sejarah” Yang Tertunda

Eva Novi Karina

Program Studi Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Jawa Timur - Indonesia

Email: evanovi.hi@upnjatim.ac.id

Diserahkan: 3 April 2019 | Diterima: 24 April 2019

Abstract

Due to historical developments and the works of theorists such as Francis Fukuyama, predominant political-economic literature has claimed that the combination of a “free market economy” and “liberal democracy built on equal rights” results in the most developed form of human society. With economic and political liberalism, societies of Western Europe and North America “at the vanguard of civilization” considered have reached the endpoint of humankind’s ideological evolution hence Western liberal democracy has been perceived as the final form of human government. However, the current rising wave of right-wing populism along with the exercise of protectionist economic measures in the most developed democratic countries has shown that democracy has begun to malfunction. Depart from this point, this article aims to re-examine the relationship between free market and democracy, and analyses the real inequalities manifested in income and the ownership of the means of production, and the inequalities within capitals, and between capital and wage labor. It concludes that the logic of market mechanisms poses a threat to democracy, while the extension of democracy would inevitably limit the freedom of the market and curb capital accumulation.

Keywords: Economic, Inequality, Democracy, Free Market, Right Populism.

Abstrak

Berakhirnya Perang Dingin dan mengemukanya karya para penteoris seperti Francis Fukuyama telah menyebabkan literatur ekonomi politik 'arus utama' mengklaim bahwa kombinasi "ekonomi pasar bebas" dan "demokrasi liberal" yang dibangun di atas "persamaan hak" menghasilkan bentuk masyarakat manusia yang paling maju. Liberalisme ekonomi dan politik dianggap telah berhasil menghantarkan masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara di "garda terdepan peradaban" dan karenanya demokrasi liberal Barat dipercaya sebagai tatanan paling final dari sistem ekonomi politik dunia. Namun, meningkatnya gelombang politik populisme kanan saat ini bersamaan dengan semakin maraknya penerapan langkah-langkah ekonomi proteksionis di negara-negara demokrasi liberal paling maju (Amerika Serikat dan Britania Raya) menunjukkan bahwa demokrasi mulai tidak berfungsi. Berangkat dari poin tersebut, artikel ini bertujuan untuk memeriksa kembali hubungan antara pasar bebas dan demokrasi, serta menganalisis berbagai dimensi ketidaksetaraan yang riil di dalamnya. Dengan merefleksikan berbagai kontradiksi tersebut, artikel ini melihat bagaimana kekuatan pasar bebas bekerja menuju pengikisan demokrasi dan membatasi pemanfaatan praktis lembaga-lembaga demokrasi, sementara perpanjangan demokrasi tidak terelakkan akan membatasi kebebasan pasar dan mengekang akumulasi modal.

Kata Kunci: Ketimpangan, Ekonomi, Demokrasi, Pasar Bebas, Populisme Kanan.

PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim sosialis di Eropa Timur pada akhir 1980-an telah mendorong euforia yang mengagungkan kelembagaan politik

didasarkan pada pasar bebas diyakini dan telah diterima oleh khalayak ramai sebagai *the end of history* (Fukuyama 1992). Dengan nada penuh kemenangan, Fukuyama menulis artikel berjudul "*The end of History*" yang terbit pada musim panas 1989 di Chicago. Argumen Fukuyama adalah dengan runtuhnya Uni Soviet, alternatif ideologis terakhir bagi liberalisme telah sepenuhnya hilang. Fasisme telah 'dikalahkan' dalam Perang Dunia Kedua dan kini Komunisme telah runtuh.

Bersandar pada postulat Hegel, Fukuyama meyakini perkembangan sejarah terjadi karena didorong oleh pertarungan ideologis dan baru akan berakhir jika bentuk masyarakat dan negara yang sangat rasional muncul menjadi pemenangnya. Maka dengan runtuhnya komunisme, Fukuyama yakin bahwa kini sejarah telah mencapai tujuannya, karena kombinasi dari ekonomi pasar bebas dan demokrasi liberal yang dibangun di atas persamaan hak ala barat memungkinkan terwujudnya bentuk masyarakat yang paling maju.

Fukuyama yakin bahwa dengan menerapkan liberalisme ekonomi dan politik, masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara yang berada di "garda terdepan peradaban" telah mencapai "akhir sejarah", yakni titik akhir evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal barat

sebagai bentuk akhir pemerintahan (Fukuyama, 1989, p. 2).

Meskipun demikian, sejak krisis finansial 2008, rapuhnya arsitektur kelembagaan kapitalisme global semakin nyata terlihat, baik di pinggiran (*periphery*) maupun di pusat (*core*) sistem ekonomi-politik global kontemporer. Terpilihnya Donald Trump pada pilpres Amerika Serikat 2016, kemenangan para pendukung Brexit pada referendum Inggris yang digelar pada tahun yang sama, dan semakin populernya Marine Le Pen di Perancis, semakin menunjukkan bahwa demokrasi sudah mulai "tidak berfungsi", dalam artian, malah berbalik melawan sistem pasar bebas justru di negara-negara yang selama ini dianggap sebagai kiblat demokrasi liberal.

Tentu tak dapat dipungkiri hasil dari kedua proses demokrasi tersebut menuai reaksi keras dari para pendukung kapitalisme. Donald Tusk (2016), Presiden Dewan Eropa, secara gamblang menyatakan bahwa "Brexit bisa menjadi awal kehancuran tidak hanya Uni Eropa tetapi juga peradaban politik Barat secara keseluruhan". Sementara berkaitan dengan kemenangan Trump, Andrew Sullivan juga memberikan pendapat bahwa "jika kita berbicara tentang demokrasi liberal dan tatanan konstitusional, Trump adalah bencana kepunahan" (Sullivan, 2016). Dia juga secara

kapitalis di atas format ekonomi politik lainnya. Demokrasi neoliberal yang gamblang mengekspresikan apa arti demokrasi bagi seorang pembela sejati kapitalisme dengan memberi judul artikelnya *“Democracies end when they are too democratic”*. Namun yang paling mengejutkan, pada awal 2017 lalu dalam sebuah wawancara dengan The Washington Post, Francis Fukuyama, sang pendeklarasi “akhir sejarah” menyampaikan kekhawatirannya terhadap perkembangan dunia. Dalam wawancara tersebut, Fukuyama mengubah keyakinannya atas “keabadian” hubungan ekonomi pasar bebas dan demokrasi liberal sebagai tatanan final sistem ekonomi politik dunia. Kondisi saat ini, ujarnya, menunjukkan tanda-tanda adanya potensi perubahan sistem ekonomi politik dunia menuju ke masa lalu (Tharoor, 2017).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah jika memang demokrasi liberal dan pasar bebas berada pada dua sisi koin yang sama—sebagaimana yang dipercaya Fukuyama dan pengikutnya—bagaimana mungkin mayoritas dari pemilih aktif di dua negara pelopor kapitalisme global justru memilih para konservatif yang kebijakannya berbalik melawan pasar bebas?

Dengan bertolak pada pemikiran Hegel (sebagaimana yang dikutip Fukuyama sendiri) bahwa

perkembangan sejarah terjadi karena didorong oleh kontradiksi, maka perkembangan sejarah baru dapat dikatakan berlabuh pada “demokrasi liberal pasar bebas” hanya jika tidak ada kontradiksi yang terjadi baik di dalam maupun diantara “ekonomi pasar bebas” dan “demokrasi liberal”. Dalam *“The End of History”*, Fukuyama jelas menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi dalam demokrasi liberal, karena setiap konflik sosial dapat diselesaikan dalam kerangka kerja kapitalisme.

Untuk menyelidiki berbagai kontradiksi tersebut, penting kiranya untuk mengkaji siapa yang sesungguhnya dilayani oleh pasar “bebas” dan “demokrasi liberal” serta bagaimana konsep “persamaan hak” (*equal rights*) justru menyembunyikan ketimpangan (*inequalities*) hakiki dalam demokrasi. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini akan diawali dengan menelaah hubungan antara demokrasi dan sistem kepemilikan serta dimensi ketimpangan di dalamnya, yang akan menjadi landasan kita untuk menelusuri bagaimana perubahan pola akumulasi kapital yang dibawa globalisasi mempengaruhi distribusi nilai tambah antara laba dan upah buruh. Berikutnya, pembahasan difokuskan pada kontradiksi yang terdapat dalam tubuh kapital dan kerja upahan serta bagaimana kekuatan

pasar bebas bekerja mengikis demokrasi liberal dan membatasi pemanfaatan lembaga demokrasi secara efektif.

Kontradiksi dalam Demokrasi Liberal

Kata demokrasi umumnya diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*rule of the people*). Namun, hal tersebut tampaknya tidak berlaku dalam demokrasil liberal. Menurut pendekatan *New Institutional Economics* (NIE), “aturan” (*rule*) merupakan hasil dari “permainan”, “pertarungan” atau “persaingan” diantara kelompok-kelompok elite.

Acemoglu dan Robinson (2006) menyatakan bahwa pada masyarakat yang sangat tidak setara (*highly unequal*) atau sangat setara (*highly equal*) tidak mungkin terjadi demokratisasi. Justru pada masyarakat yang berada di tingkat ketimpangan menengah, demokratisasi dimungkinkan. Keduanya berpendapat bahwa kemiskinan adalah pilihan elite penguasa: “*poor countries are poor because those who have power make choices that create poverty*” (Acemoglu & Robinson, 2012, p. 78), artinya persoalan kesejahteraan masyarakat utamanya adalah persoalan politik. Demikian pula North (*et. al*) (2009) yang menyatakan bahwa demokratisasi sebagai proses transisi dari masyarakat dengan “akses

terbatas” menuju “akses terbuka” dimulai ketika elite yang berkuasa memutuskan untuk mentransformasi privilese pribadi menjadi hak-hak impersonal yang dibagikan secara merata diantara golongan elite. Mereka secara implisit mengakui bahwa suprastruktur dari masyarakat kapitalis dikonstruksi oleh dan untuk kelas-kelas penguasa. Dalam hal ini, North berbagi pandangan yang sama dengan Fukuyama bahwa di negara-negara maju, dimana demokrasi, persaingan pasar dan hukum korporasi berlaku, negara mengizinkan persaingan antar-kelompok elite sembari memegang monopoli atas legitimasi penggunaan kekerasan dalam rangka menjaga ketertiban sosial (North, *et.al.*, 2006, pp. 220-249).

Selanjutnya, bagaimana realitas demokrasi ini bekerja dijelaskan oleh G. William Domhoff (2012), yang mengumpulkan data mengenai kelas penguasa di Amerika Serikat sejak 1960-an. Ia mendefinisikan kelompok berkuasa Amerika Serikat sebagai “elite kekuasaan” yang terdiri dari “komunitas korporasi”, “orang-orang kelas sosial atas” (yang kaya dan berpengaruh), serta “jejaring perencanaan kebijakan” (yayasan dan lembaga-lembaga *think-tank*). Dormhoff menyimpulkan bahwa kekuatan dominan di Amerika Serikat sejak 1776 hingga saat ini adalah “*the owners and managers of large income-*

producing properties; that is the owners of corporations, banks, other financial institutions, and agri-businesses” (Domhoff, 2012).

Temuan-temuan Domhoff (2012) kembali membuktikan bahwa kekuasaan selalu berlandaskan pada kepemilikan pribadi dan kelas-kelas sosial ditentukan berdasarkan relasi mereka terhadap kepemilikan alat-alat produksi (*owners vs non-owners*). Hanya kepemilikan atas alat-alat produksilah yang dapat dikatakan “*ownership*” disini. “*Ownership*” ini dapat juga disebut *initial advantage* (keuntungan awal) yang memungkinkan pemiliknya secara utuh mendapatkan keuntungan-keuntungan berikutnya dan mengakumulasi (Marx, 1867). Keuntungan yang didapatkan melalui cara ini kemudian disebut sebagai *cummulative advantage* (keuntungan kumulatif). Begitu kepemilikan alat-alat produksi memungkinkan penghisapan kerja, maka proses akumulasi terakselerasi.

Dalam kapitalisme, keuntungan kumulatif mengambil bentuk-bentuk kapital dan terakumulasi melalui mekanisme pasar dimana secara formalitas semua orang memiliki “hak yang sama” untuk ambil bagian. Namun kesetaraan formalitas ini tentunya dipijakkan di atas ketidaksetaraan yang nyata atas kepemilikan.

Dalam sejarahnya, sistem kepemilikan memang diciptakan dengan cara yang tidak demokratis dan dalam banyak kasus terjadi melalui perampasan langsung. Kemudian seiring dengan diciptakannya konsep pengambilalihan (*expropriation*), proses akumulasi kepemilikan pun dilakukan melalui cara yang “berlandaskan hukum”. Para pemilik (*the owners*) berhak atas pengelolaan kepemilikan mereka dan keuntungan yang didapatkan darinya (kekayaan dan kekuasaan), karena sejak awal tatanan hukum baru yang berlaku diciptakan untuk melindungi hak-hak kepemilikan pribadi para *owners* (North *et.al*, 2009, pp. 150-154).

Dalam kapitalisme, hak milik (*property rights*) berarti kepemilikan pribadi dijamin oleh aturan hukum dan tidak dapat diganggu gugat. Begitu pula dengan hak mereka baik dalam mengelola (*to operate*) maupun mencampakkan (*to dispose*) alat-alat produksi, sepenuhnya bersifat tidak dapat diganggu gugat (Marx, 1867). Beberapa keputusan minor mungkin saja melibatkan para *non-owners* secara “demokratis”, namun fungsi kepemilikan dan hak untuk melipatgandakan kekayaan pribadi dengan segenap caranya tidak dapat diganggu gugat. Siapa yang akan membantah bahwa perusahaan memang sejatinya harus kompetitif dan menghasilkan keuntungan? Semua

urusan lain mungkin dapat diputuskan secara demokratis, namun demokrasi tidak berlaku untuk urusan produksi.

Dalam produksi, diktum yang berlaku hanyalah memperoleh keuntungan kumulatif dan meningkatkan daya saing.

Dalam kapitalisme, orang memang bebas untuk memilih hubungan kontrak yang ingin mereka masuki, tidak seperti feodalisme atau perbudakan, dimana kelompok tertentu dapat secara langsung mengontrol tindakan orang lain. Namun isi kontrak sudah ditentukan terlebih dahulu oleh relasi kepemilikan: mereka yang tidak memiliki modal hanya dapat menawarkan daya kerjanya, sehingga sejak awal sudah kehilangan posisi tawar untuk memiliki apa yang mereka hasilkan melalui pekerjaan mereka. Mereka yang memiliki modal secara sah akan menjadi pemilik seluruh produk yang diciptakan oleh pekerja dan hanya akan membayar nilai yang dihasilkan pekerja sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak. Karena itulah hierarki antara kelompok (kelas) masyarakat kini ditentukan oleh paksaan-paksaan ekonomi: setiap orang hidup dalam kapitalisme, sehingga agar dapat membeli, mereka harus menjual apa yang mereka punya. Jika tidak lagi punya apa-apa, mereka menjual daya kerjanya.

Selanjutnya, karena keuntungan kumulatif selalu bergerak maju, diikuti kapital yang terakumulasi melalui laba, membuat kekayaan dan *bargaining power* para *owners* pun semakin meningkat. Sementara pada saat yang sama, posisi mereka yang hanya memiliki daya kerja terus melorot. Pada gilirannya, para pemilik modal memiliki perluasan akses untuk mengoperasikan alat-alat produksi lainnya (seperti institusi pendidikan, media pemberitaan dan publikasi) yang cocok untuk mempengaruhi sikap dan pola pikir masyarakat luas (Lenin, 1917). Melalui pendidikan dan media, paksaan-paksaan ekonomi yang dialami rakyat pekerja dapat disajikan kepada publik sebagai “hal yang lumrah dan alamiah” dalam perkembangan masyarakat kapitalis.

Ketimpangan dalam daya tawar yang dimiliki kelas-kelas sosial ini akan terus mengikis substansi demokrasi politik dan mereduksinya menjadi sekedar formalitas belaka. Jadi, sekalipun sistem kelembagaan demokrasi politik semakin maju dan berkembang, ketimpangan politik maupun ekonomi juga terus meningkat. Faktanya, dengan semakin meningkatnya ketimpangan di antara kelas maupun di dalam masing-masing kelas, kontradiksi tersebut pada gilirannya juga akan mempengaruhi operasional dan kelembagaan formal demokrasi politik.

Kontradiksi dalam Reproduksi Kapital

Reproduksi kapital yang dilakukan untuk menciptakan nilai lebih (*surplus value*) kini berlangsung dalam skala global karena aktivitas korporasi transnasional. Sementara itu, sistem ekonomi dunia bersifat hierarkis dan pemanfaatan hierarki ini akan berimplikasi pada peningkatan nilai tambah (*value added*). Secara sekilas, hierarki tampak muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan kondisi reproduksi modal antar-negara, terutama pada perbedaan tingkat upah. Namun, perbedaan upah juga tunduk pada sokongan alat-alat produksi.

Negara-negara berkembang (*periphery*) umumnya memiliki sarana produksi yang kurang maju, dan karenanya pendapatan mereka lebih kecil, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat upah. Dalam hal ini, penguasaan teknologi yang lebih maju dikombinasikan dengan ongkos tenaga kerja yang lebih rendah menghasilkan pengembalian modal keuntungan yang lebih tinggi. Maka logikanya, akan lebih menguntungkan bagi negara-negara maju (*core*) yang menguasai teknologi maju untuk menerapkannya di lokasi produksi yang upah buruhnya lebih rendah, yaitu di negara-negara *periphery*. Relasi semacam inilah yang kemudian dirumuskan oleh Wallerstein (2004) dalam konsep

pembagian kerja aksial (*axial division of labour*) antara pusat (*core*) dan pinggiran (*periphery*) dalam sistem ekonomi global (Wallerstein, 2004, p. 17). Hubungan *core-periphery* ini tidak semata-mata bersifat geografis, melainkan didasarkan pada pembagian produksi dunia, dimana *core* yang dicirikan oleh sistem produksi dengan profitabilitas tinggi, padat modal namun pasarnya semi-monopolistik, dan *periphery* yang dicirikan oleh sistem produksi yang biasanya kurang menguntungkan, bersifat padat karya namun memiliki pasar yang lebih kompetitif di sisi lain (Wallerstein, 2004, pp. 28-93).

Bebasnya pergerakan arus modal di era kapitalisme transnasional ini telah membuat relokasi produksi dan teknologi dari satu negara ke negara lainnya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Konsekuensinya, rentang siklus reproduksi kapital pun semakin singkat. Banyak literatur yang menjelaskan tentang siklus reproduksi kapitalis yang bekerja di berbagai level produksi, namun secara garis besar, seluruh siklus tersebut bekerja dengan logika yang sama dimana ia terdiri dari fase inovasi dan fase ekspansi (Grinin *et al.* 2016). Fase inovasi ini umumnya berlangsung di negara-negara maju sebagai pusat sistem kapitalisme global yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan besarnya tekanan persaingan antar-korporasi, begitu sebuah inovasi muncul, perusahaan inovator dipaksa

untuk merelokasi dan memperluas produksinya ke negara-negara dengan tingkat upah yang lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya, fase ekspansi dari siklus reproduksi kapital berlangsung di negara-negara *periphery* dan *semi-periphery*, dimana tenaga kerja sektor-sektor tradisionalnya telah semakin terintegrasi ke dalam sistem kerja upahan.

Dalam hal ini, perkembangan intensif inovasi di negara-negara *core* mendorong pertumbuhan *periphery*, sementara pertumbuhan di *periphery* menawarkan input berbiaya rendah (terutama, tenaga kerja murah) untuk perluasan inovasi industri yang menguntungkan *core*. Ekspansi tersebut memang mendorong “pertumbuhan ekonomi” dan penetapan harga serta upah di *periphery*. Namun, sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan dihisap dari *periphery* menuju *core* melalui repatriasi (penginvestasian kembali) laba dan *transfer pricing* (penentuan harga transfer) sebagai bayaran atas “*technical assistance*” yang diberikan perusahaan transnasional ke negara tuan rumah. Baik pertumbuhan ekonomi di *periphery* maupun nilai tambah yang dihisap darinya, pada akhirnya sama-sama menjalankan fungsi untuk memberi bahan bakar bagi pertumbuhan industri di *core*. Meskipun tingkat teknologi dan produktivitas di *periphery*

meningkat yang berimplikasi pada peningkatan rasio Pendapatan Domestik Bruto (PDB), namun hal tersebut tentunya masih tertinggal jauh dari tingkat penguasaan teknologi dan produktivitas di *core*. Dalam banyak kasus, peningkatan teknologi di negara-negara *periphery* sangat terbatas dan tidak berfokus pada peningkatan di bidang penelitian dan pengembangan (R&D). Fungsi R&D sebagian besar tetap menjadi monopoli perusahaan transnasional dengan efek *spill-over* ke negara tuan rumah (*periphery*) yang sangat terbatas.

Sebagai konsekuensi dari ketertinggalan teknologi dan penghisapan nilai tambah di *periphery*, kesenjangan antara *core* dan *periphery* pun terus meningkat dan terpelihara. Bagi pendukung mazhab “pertumbuhan ekonomi”, hubungan ini tampak bukan masalah, karena asumsinya inovasi baru akan terus berdatangan dari *core* dan memungkinkan peningkatan nilai tambah dan upah yang lebih tinggi di *periphery*. Namun, ketika terjadi krisis di *core*, yaitu saat tidak ada inovasi baru yang mendorong produksi, strategi penyesuaian harus dilakukan di *periphery*, yang umumnya dilakukan melalui: pertama, tindakan penghematan seperti pemotongan upah dan belanja jaminan sosial atau kedua, dengan memindahkan produksi ke negara lain dimana upah buruhnya

lebih rendah dan regulasinya lebih “ramah” investasi asing. Sayangnya, kedua skenario tersebut sama-sama mengarahkan pertumbuhan ekonomi di *periphery* pada kemandegan (fenomena ini digambarkan oleh literatur arus utama sebagai “*middle-income trap*”), sementara semakin terintegrasinya negara-negara baru (yang upah buruhnya lebih rendah tadi) ke dalam reproduksi global semakin menekan dan memicu penurunan tingkat upah yang lebih rendah lagi dalam skala global.

Dalam proses global yang fluktuatif ini, tingkat rata-rata upah (*average wages*) memang mengalami peningkatan, namun pangsa upah (*wage share*) cenderung terus mengalami kemerosotan. Penghasilan seorang pengangguran boleh jadi meningkat jika dia mendapat pekerjaan, namun gajinya bisa jadi lebih rendah dari upah terendah di negara tersebut saat sebelum dia dipekerjakan. Bahkan jika upah karyawan ini meningkat pada bulan kedua masa kerjanya, upah baru ini boleh jadi memiliki *share* yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai tambah dari gaji bulan pertamanya (Stockhammer, 2013).

Hal ini menjelaskan bagaimana mungkin angka kemiskinan absolut menurun, sementara angka kemiskinan relatif meningkat di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir (Chen and Ravallion 2012),

yang berarti kemiskinan relatif dapat terjadi pada saat yang sama dengan tingginya tingkat konsumsi individu. Resnick dan Wolff (2003) berpendapat bahwa meningkatnya standar konsumsi pekerja produktif dan tidak produktif di Amerika Serikat disertai dengan meningkatnya tingkat eksploitasi—yang merupakan ekspresi lain dari jatuhnya pangsa upah dalam nilai tambah—selama lebih dari 130 tahun terakhir. Kesimpulan ini juga didukung oleh temuan Kotz (2009) yang menyatakan bahwa di Amerika Serikat, peningkatan keuntungan telah tumbuh secara signifikan lebih cepat daripada upah buruh sejak 1979. Di negara-negara OECD, penurunan pangsa upah juga terjadi secara substansial sejak 1970-an (Stockhammer, 2013). Temuan-temuan ini menunjukkan dengan gamblang kecenderungan turunnya pangsa upah bahkan di negara-negara pusat sistem kapitalisme global.

Kontradiksi dalam Kelas Kapitalis

Di era kapitalisme transnasional ini, kontradiksi dalam kapital pun semakin tajam. Pertama, karena kompetisi oligopolistik antara perusahaan-perusahaan transnasional (*Transnational Corporations/TNCs*) yang meningkat sejak 1970-an dan kedua, karena TNCs telah menjadi tantangan besar bagi korporasi yang lebih kecil,

yang notabene perusahaan-perusahaan nasional.

Korporasi transnasional dapat mengakumulasikan kapital dengan menarik keuntungan dari korporasi kecil (nasional) melalui beberapa cara. TNC biasanya memilih pemasoknya dari perusahaan-perusahaan nasional yang bersaing satu sama lain dan saling menurunkan harga agar terpilih. Padahal perusahaan nasional ini memiliki teknologi produksi yang lebih rendah dan menanggung biaya tenaga kerja yang relatif lebih tinggi. Kondisi ini tentunya menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih kecil bagi perusahaan pemasok nasional, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan dan investasi teknologi mereka. Di sisi lain, kondisi ini membawa keuntungan bagi perusahaan transnasional yang dapat menjual produk mereka (mis., teknologi canggih) dengan harga monopoli ke perusahaan-perusahaan nasional. Sebagai akibatnya, perusahaan transnasional menjadi lebih besar dan mampu membayar karyawan mereka dengan upah lebih tinggi, sementara perusahaan nasional dengan kapital yang lebih kecil “dipaksa” oleh kekuatan pasar untuk menekan upah dan mencoba menghindari pajak.

Konsekuensinya adalah munculnya keberadaan tenaga kerja yang tidak dinyatakan (*undeclared*) dan

tidak dilaporkan (*unreported*) terlibat dalam “ekonomi bayangan” (Schneider, 2013). Meskipun biasanya yang menopang ekonomi bayangan ini adalah bisnis kecil, mereka melakukannya di bawah tekanan perusahaan-perusahaan transnasional. Harga dan upah yang lebih rendah dari ekonomi bayangan berkontribusi secara tidak langsung dalam membatasi kenaikan upah dalam ekonomi formal yang “dinyatakan”, dimana aktor utamanya adalah perusahaan-perusahaan transnasional. Semakin lemah modal nasional suatu negara, semakin besar pula kontribusi ekonomi bayangannya terhadap PDB-nya. Inilah faktor yang membuat tingkat upah rata-rata di suatu negara turun. Di negara-negara *periphery*, TNC dapat mewujudkan tingkat laba yang lebih tinggi dibandingkan di negara-negara *core* yang memiliki ekonomi bayangan yang lebih kecil. Jadi, penerima manfaat terbesar dari penghindaran pajak perusahaan-perusahaan kecil justru adalah perusahaan-perusahaan transnasional. Disamping itu, mereka juga menikmati pembebasan pajak substansial (*substantial tax exemptions*) yang umumnya disediakan oleh negara tuan rumah untuk merangsang penanaman modal asing (PMA).

Karena ketimpangan ini, pemilik modal kecil cenderung menganggap pemilik modal besar sebagai

“penindas”. Karena perusahaan besar ini biasanya TNC atau “perusahaan asing”, dan perusahaan kecil biasanya “perusahaan nasional”, konflik antara kepentingan pemilik modal besar dan kecil mudah diterjemahkan sebagai kontradiksi antara kapital “asing” dan “nasional”. Pemerintah dan politisi yang melayani kepentingan yang pertama, biasanya disebut elite “komprador”, sementara mereka yang menyatakan kepentingannya untuk mendukung yang terakhir disebut “nasionalis”. Baik elite komprador maupun nasionalis, keduanya sama-sama diikat oleh keuntungan finansial yang mengalir dari pihak yang mereka dukung. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh pemilihan presiden di Amerika Serikat dan referendum di Inggris tahun 2016, kepentingan pemilik modal “nasional” pada batas tertentu menjadi tumpang tindih dengan kepentingan mereka yang tidak memiliki modal, karena pertama, pengembangan modal domestik berarti pengembangan basis produksi dalam negeri, dan kedua, perusahaan terkecil seperti UMKM (usaha menengah, kecil dan mikro) dalam situasi aktualnya tidak jauh berbeda dengan penerima upah.

Situasi ini menyajikan lahan subur untuk kebijakan-kebijakan “nasional” yang menguntungkan para pemilik modal domestik. Meskipun tujuannya adalah untuk memperluas

akses para kapitalis domestik dalam mengeksploitasi sumber tenaga kerja, hal ini dapat ditutupi oleh berbagai propaganda nasionalistik dan semangat “anti-asing”. Dalam rangka memperkuat daya saing (baca: kemampuan menghasilkan laba) dari pemilik modal nasional, pemerintahan yang nasionalis harus memfasilitasi perubahan kondisi pasar tenaga kerja domestik dengan cara yang menguntungkan bagi pengusaha domestik, tapi pasti akan merugikan pekerja. Pangsa upah (*wage share*) yang dihasilkan dari nilai tambah harus direduksi melalui pengurangan harga satuan tenaga kerja (biaya tenaga kerja per jam kerja). Pereduksian ini dapat dicapai dengan meningkatkan intensitas kerja karyawan, menetapkan upah yang lebih rendah, melemahkan serikat pekerja dan memperkecil kontribusi sosial dari pekerja, sehingga posisi pendapatan relatif pekerja semakin berkurang, dan pada gilirannya akan berimplikasi pada menurunnya pendapatan absolut pekerja. Tentu saja, kebijakan represif semacam ini tidak dapat dilakukan dengan sarana demokrasi liberal, sehingga mau tidak mau, penerapan kebijakan “nasionalis” semacam ini pada akhirnya akan juga mengarah pada pembatasan demokrasi liberal. Ketimpangan antara pemilik modal juga menyebabkan pengikisan atas nilai-nilai demokrasi liberal.

Kontradiksi dalam Kelas Pekerja

Pengurangan *wage share* merefleksikan sebuah mekanisme “rata-rata” yang menyembunyikan ketimpangan upah di dalamnya. Perbedaan upah ini telah meningkatkan jumlah kelompok rentan dalam dekade terakhir, terutama sejak krisis 2008 di banyak negara, termasuk di negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang, menurut Fukuyama, memungkinkan perwujudan bentuk masyarakat yang paling baik.

Deregulasi pasar tenaga kerja, aliran bebas kapital dan peningkatan migrasi telah menyebabkan munculnya kelas bawah dari kelas pekerja, “prekariat”, yang tidak hanya terjadi di pinggiran tetapi juga di pusat-pusat kapitalisme global. Istilah prekariat merupakan perpaduan antara “*precarious*” (rentan) dan proletariat (kelas pekerja), atau pekerja yang berada pada kondisi rentan. Istilah baru yang dipopulerkan oleh Guy Standing ini umumnya merujuk pada para pekerja yang terlibat dalam pola ketenagakerjaan yang “tidak permanen” dan “fleksibel” seperti sistem kontrak, *outsourcing*, *part-time*, *freelance* dan *teleworking* (Polimpung, 2018).

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan *International Labour Organization* (2018), sekitar 1,4 milyar pekerja diperkirakan merupakan

pekerja rentan pada tahun 2017, dan jumlah tersebut akan bertambah sekitar 35 juta lagi pada tahun 2019. Di negara-negara berkembang, jumlah pekerja rentan berada pada rasio 3:4 dari jumlah pekerja. Sementara pekerja global yang hidup dalam kemiskinan ekstrem diperkirakan akan tetap bertahan di atas 114 juta dan mempengaruhi sekitar 40 persen dari seluruh angkatan bekerja untuk tahun-tahun mendatang (ILO, 2018). Di Uni Eropa (27 negara), proporsi pekerja miskin di kalangan angkatan bekerja usia 18-64 tahun meningkat dari 8,1 menjadi 9,6 persen antara 2007 dan 2017. Dalam kelompok usia 18-24 tahun, peningkatannya bahkan lebih dramatis, dari 9,6 menjadi 11 persen pada periode yang sama (Eurostat, 2019).

Sementara di Inggris berkembang skema kerja dengan perjanjian *opt-out* dan kontrak *zero-hour*. Perjanjian *opt-out*, memungkinkan seorang pekerja untuk menjalin kontrak di luar aturan umum—bahwa seorang karyawan tidak dapat bekerja lebih dari rata-rata 48 jam/minggu. Tahun 2015, lebih dari 3,4 juta pekerja di Inggris bekerja lebih dari 48 jam/minggu (TUC, 2015a) dan seperlima dari tenaga kerja tersebut bekerja lembur secara konstan tanpa bayaran. Jumlah upah yang belum dibayarkan untuk lembur mencapai £32 miliar pada tahun 2014 (TUC, 2015b). Di sisi lain, kontrak

zero-hour berfungsi sebagai perjanjian *on-call* (“sesuai panggilan”) dimana pemberi kerja tidak menawarkan jaminan masa kerja dan upah. Pada tahun 2001, sekitar 0,6 persen atau 176.000 pekerja di Inggris bekerja dengan kontrak *zero-hour*, dan jumlah mereka meningkat menjadi 903.000 pekerja atau 2,9 persen pada 2016 dengan rata-rata waktu kerja selama 25 jam seminggu (ONS, 2017).

Ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang semakin dirasakan masyarakat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris secara alami telah meningkatkan dahaga sebagian besar masyarakat akan “perubahan”, kehidupan yang lebih baik dan “ketertiban umum”, tidak peduli apakah perubahan tersebut ditawarkan sayap kiri atau kanan. Kondisi ini mencerminkan bahwa bahkan rakyat di negara maju yang didasarkan pada demokrasi liberal sekalipun tidak dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Hal ini tidak saja disebabkan oleh alasan politik—karena demokrasi liberal sejak awal memang dibangun dalam bentuk perwakilan dimana seseorang dengan menggunakan hak pilihnya menyerahkan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri ke tangan orang lain—tetapi juga alasan ekonomi, bahwa semua produk yang diproduksi oleh rakyat pekerja, tidak dapat dijangkau mereka secara

langsung: mereka yang memproduksi barang-barang itu sendiri harus membelinya di pasar. Dalam hal ini, rakyat teralienasi baik dari hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri maupun dari produk yang mereka hasilkan sendiri.

Sayangnya, perubahan dan ketertiban yang didambakan sebagian besar rakyat memiliki karakter yang sama sekali berbeda dari ketertiban yang diinginkan oleh kelas penguasa. Namun tentu saja perbedaan ini tetap tersembunyi, terutama ketika krisis terjadi dan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan “penghematan” yang pada akhirnya memperburuk permasalahan sosial demi menyelamatkan segelintir individu pemilik modal. Hal ini terjadi karena kapitalisme global secara terang-terangan merepresentasikan ketidakadilan dalam memperoleh keuntungan kumulatif, masyarakat yang mengalami kekalahan dan kerentanan ini dengan mudah mengantagoniskan kapitalis global sebagai biang atas ketimpangan dan ketidakpastian hidup yang mereka alami.

Pada saat yang sama, para kapitalis nasional yang terlihat kalah bersaing dan menjadi “korban” atas keserakahan kapitalis global, diasumsikan sebagai pihak protagonis yang mengemban mandat “memperjuangkan kesejahteraan

rakyat” dan “membangun negara yang lebih kuat.” Dengan logika populis ini, masyarakat dengan mudah menitipkan nasib dan pengharapannya atas penghidupan yang lebih baik kepada para elite yang menunjukkan keberpihakannya pada kapitalis “nasional” di negara mereka.

Dalam situasi ini, pemilihan umum dapat dengan mudah membawa elite baru “nasionalis” ke tampuk kekuasaan. Namun, seperti sudah dibahas sebelumnya, logika kapital tidak bisa tidak harus terus menerus meningkatkan eksploitasinya, dan ketika kontradiksi di tubuh kapital sudah semakin akut, pada gilirannya ia akan membangkitkan kemarahan rakyat terhadap penguasa baru. Maka, untuk mencegah situasi demikian, pemerintah perlu membatasi demokrasi, memusatkan kekuasaan dan memberangus segala bentuk protes, melalui politik populisme yang digunakan untuk mengalihkan ketidakpuasan rakyat dari elite penguasa ke kelompok rentan lainnya, seperti etnis minoritas, pekerja migran, penganut agama minoritas, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Demokrasi liberal dapat diperkuat dengan mengurangi ketimpangan, tapi penanganan ketimpangan mensyaratkan pembatasan terhadap kekuatan pasar,

kompetisi dan akumulasi kapital. Begitupun juga sebaliknya, meningkatkan kebebasan pasar secara otomatis akan memperparah ketimpangan yang berimplikasi pada pembatasan demokrasi. Jika masalah kepemilikan (*ownership*) dibiarkan tidak terselesaikan, maka demokrasi hanya berfungsi untuk melayani akumulasi kapital.

Meskipun demikian, para ekonom Keynesian berpikir bahwa upaya mengentaskan ketimpangan dan memperluas demokrasi (melampaui formalitasnya) masih mungkin dilakukan dengan menempatkan kebijakan pemerintah di garda terdepan. Stiglitz (2013) —didukung oleh Acemoglu dan North— berpendapat:

“Inequality is a product of political and not merely macroeconomic forces. It is not true that inequality is an inevitable by-product of globalization, the free movement of labor, capital, goods and services, and technological change that favors better-skilled and better-educated employees” (Stiglitz, 2013).

Stiglitz tampaknya lupa bahwa tujuan pemerintah berikut dengan isi kebijakannya adalah selalu melayani kepentingan spesifik dari masyarakat tertentu. Kapitalisme berdiri di atas landasan kepemilikan pribadi atas kekuatan produksi, maka pemerintah yang hadir dari sistem ini mau tidak

mau akan bertindak untuk mendukung parapemilik alat-alat produksi. Ini berarti bahwa, pada akhirnya, semua pemerintah kapitalis akan selalu menjalankan kebijakan yang mendorong peningkatan laba, yang hanya bisa dilakukan melalui pengurangan pangsa upah pekerja.

Jika pun pemerintah bermaksud untuk memasukkan kepentingan rakyat pekerja ke dalam kebijakannya, hal ini berarti pemerintah harus menyediakan akses menuju pendidikan gratis dan berkualitas, perawatan kesehatan, transportasi publik yang terjangkau, dan pertama-tama, *full employment* dengan upah yang layak. Namun, hal demikian tentu tidak dimungkinkan dalam kapitalisme karena redistribusi pendapatan dan kekayaan dalam jumlah besar bagi orang miskin jelas bertentangan dengan logika persaingan bebas dan pengejaran keuntungan. Buat apa perusahaan meningkatkan volume dan tingkat laba jika surplus yang dihasilkan harus didistribusikan kembali kepada mereka yang nilai kerjanya dirampas untuk menciptakan surplus tersebut?

Pemerintah yang ingin memperluas batas demokrasi dengan menunjukkan keberpihakannya pada rakyat banyak (yaitu kelas pekerja) tentunya membutuhkan lebih banyak sumber pendapatan dari para pemilik modal. Pemerintah yang seperti itu,

harus menaikkan pajak dan bertindak melawan kepentingan akumulasi kapital. Namun dengan melakukan itu, pemerintah tersebut akan menahan pertumbuhan ekonomi dan menghentikan pengembangan kekuatan produktif. Hal ini—yang tersisa dalam kerangka kapitalisme—tentunya akan menghasilkan penurunan daya saing. Skenario ini menjelaskan mengapa Keynesianisme gagal dalam banyak hal: redistribusi pendapatan yang menguntungkan pekerja akan menghambat akumulasi modal dan akan segera memerlukan perubahan arah kebijakan kembali menuju ekonomi pasar bebas—seperti yang terjadi pada pasca Great Depression di akhir 1970-an.

Titik akhir pembahasan dalam tulisan ini adalah bahwa kontradiksi mendorong perkembangan sejarah. Jika tidak ada kontradiksi antara dan di dalam pasar bebas dengan demokrasi liberal, maka tatanan masyarakat seharusnya telah mencapai bentuk akhirnya. Namun, kontradiksi demi kontradiksi terus bermunculan baik antara sistem pasar bebas dan demokrasi, maupun di dalam masing-masing komponen pembentuknya. Logika yang melekat dari mekanisme pasar bebas menimbulkan ancaman bagi demokrasi, sementara perluasan demokrasi tidak bisa tidak akan membatasi kebebasan pasar dan menghentikan roda akumulasi kapital.

Di penghujung wawancaranya dengan The Washington Post (2017), Fukuyama membiarkan pintu “sejarah” terbuka untuk ketidakpastian di masa depan, ia berujar “*Perhaps this very prospect of centuries of boredom at the end of history, will serve to get history started once again*” (Tharoor, 2017). Pernyataan Fukuyama ini dan perkembangan dunia yang penuh kontradiksi, menegaskan kembali pada kita bahwa perubahan bentuk tatanan masyarakat pasca kapitalisme adalah hal yang niscaya dan tidak bisa dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2006) *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2012) *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishers.
- Chen, S., and Ravallion, M. (2013) ‘More Relatively-Poor People in a Less Absolutely-Poor World’, *Review of Income and Wealth*, Vol. 59, Issue 1, pp. 1-28.
- Domhoff, G. W. (2005) *Who Rules America? The Triumph of the Corporate Rich*. 7th edition. United States: McGraw-Hill Higher Education.
- Domhoff, G. W. *The Class-Domination Theory of Power* (Online). Tersedia di: https://whorulesamerica.ucsc.edu/power/class_domination.html. (Diakses: 4 Februari 2019).
- Eurostat. (2019) *In-work at-risk-of-poverty rate by age and sex - EU-SILC Survey* (Online). Tersedia di: <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/n>
- ui/submitViewTableAction.do (Diakses: 2 February 2019).
- Grinin, L, A. Korotayev, and A. Tausch. (2016) *Economic Cycles, Crises and Global Periphery*. Switzerland: Springer International Publishing.
- ILO. (2018) *ILO: Unemployment and Decent Work Deficits to Remain High in 2018* (Online). Tersedia di: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_615590/lang--en/index.htm (Diakses: 22 Januari 2019).
- Kotz, D.M. (2009) ‘The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism’, *Review of Radical Political Economics*, Vol. 41(3).
- Lenin. (2002) *How to Guarantee the Success of the Constituent Assembly* (Online). Tersedia di: <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/sep/28.htm>. (Diakses: 5 Februari 2019).
- North, D.C, J.J Wallis, and B.R Weingast. (2009) *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. New York: Cambridge University Press.
- ONS. (2017) *People In Employment on a Zero-Hours Contract* (Online). Tersedia di: <https://www.ons.gov.uk/releases/peopleinemploymentonazerohourscontractmar2017> (Diakses: 31 January 2019).
- Polimpung, H. Y. (2018) *Ngomong-ngomong Apa itu Pekerja Prekariat* (Online). Tersedia di: <http://theconversation.com/ngomong-ngomong-apa-itu-pekerja-prekariat-83048> (Diakses: 8 January 2019).
- Resnick, S. and Wolff, R. (2003) ‘Exploitation, Consumption and the Uniqueness of US Capitalism.’ *Historical Materialism*, Vol. 11(4).

- Stiglitz, Joseph E. (2013) 'Inequality is A Choice'. *The New York Times* (Online). Tersedia di: <https://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/10/13/inequality-is-a-choice/> (Diakses: 31 Januari 2019).
- Stockhammer, E. (2013) 'Why have wage shares fallen? A panel analysis of the determinants of functional income distribution', *Condition of Work and Employment Series, No.35*, pp. 40-70. Geneva: International Labor Organization.
- Sullivan, A. (2016) *Democracy End When They Are too Democratic* (Online). Tersedia di: <http://nymag.com/intelligencer/2016/04/america-tyranny-donald-trump.html?gtm=bottom>m=top>. (Diakses 31 Januari 2019).
- Tharoor, I. (2017) *The Man Who Declared The End of History' Fears for Democracy's Future* (Online). Tersedia di: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/09/the-man-who-declared-the-end-of-history-fears-for-democracys-future/?noredirect=on&utm_term=.d501864d9492 (Diakses: 31 Januray 2019).
- TUC. (2015a) *15 per cent increase in people working more than 48 hours a week risks a return to 'Burnout Britain', warns TUC* (Online). Tersedia di: <https://www.tuc.org.uk/news/15-cent-increase-people-working-more-48-hours-week-risks-return-%E2%80%98burnout-britain%E2%80%99-warns-tuc>. (Diakses: 23 Januari 2019).
- TUC. (2015b) *Workers Contribute £32bn to Uk Economy from Unpaid Overtime* (Online). Tersedia di: February 27. Accessed January 23, 2019. <https://www.tuc.org.uk/news/workers-contribute-%C2%A332bn-uk-economy-unpaid-overtime> (Diakses: 23 January 2019).
- Tusk, D. (2016) *Brexit Could Threaten Western Political Civilization, Says Eu's Tusk* (Online). Tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-tusk-idUSKCN0YZ0Q9> (Diakses: 20 Januari 2019).